

SIMBOLISME DALAM PENCITRAAN PARTAI POLITIK

Nila Sastrawati

Dosen Sosiologi Politik Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Alauddin Makassar

Abstrak

Simbol dan politik merupakan dua entitas yang tak dapat dipisahkan. Instrumen-instrumen yang digunakan dalam politik khususnya partai politik tidak terlepas dari symbol-simbol dengan pemaknaan yang disepakati sebagai makna yang melingkupi symbol yang dihadirkan. Simbol tampil dan hadir dengan sendirinya, tetapi dicitrakan menjadi entitas yang luar biasa sehingga mampu menjadi pemikat dalam mencapai tujuan partai politik.

Kata Kunci:

Simbol, Partai Politik.

A. Pendahuluan

System multipartai yang diterapkan di Indonesia berkonsekuensi pada kesiapan partai dalam menghadapi persaingan dalam memperoleh dukungan masyarakat mengingat ideologi dan program-program yang diusung mayoritas partai cenderung sama. Isu-isu yang diusung partai politik berkuat pada isu keadilan, kesejahteraan, dan persamaan, dimana realitas kehidupan sosial, ekonomi, dan politik masyarakat tidak dapat dilepaskan dari isu-isu tersebut. Realitas ini menggiring Partai Politik untuk memformulasikan segala potensi yang dimiliki sehingga dapat membangun citra yang baik pada masyarakat.

Pecitraan dalam dunia politik berbanding lurus dengan eksistensi informasi yang menampilkan segala sesuatu berbeda dengan makna aslinya. Kondisi ini dikenal dengan abad "citraan" (*the age of the image*), disebabkan realitas dunia yang dibangun oleh teknologi informasi muthahir disesaki oleh citra-citra dengan beragam perwujudan. Piliang menyebut abad citraan dimana dunia dikuasai oleh representasi dan yang nyata sesungguhnya adalah yang tampak (termasuk simbol), bukan dibalik simbol.³ Simbol menjadi bagian penting dari perjalanan suatu partai

³ Piliang, Yasraf Amir, 2004, *Postrealitas : Realitas Kebudayaan dalam Era Post Metafisika*, Jalasutra, Jakarta, h. 452

politik, sehingga beberapa partai politik melakukan transformasi simbol (visual) dengan tujuan-tujuan tertentu. Sebagaimana dikemukakan Piliang, sebagai abad “citra-an”, setiap entitas tampil dengan wujud yang berbeda dengan makna sesungguhnya. Realita politik yang terbangun menunjukkan, isu keadilan, kesejahteraan, persamaan hak, merupakan wacana simbol yang menjadi *centra point* sebagai “jualan” partai, terlepas apakah wacana itu dapat diwujudkan atau tidak.

Politik pencitraan sangat terkait erat dengan simbol-simbol yang dibangun Partai, baik dari lambang, ideologi, slogan, maupun simbol-simbol lain. Penggunaan “pencitraan” sebagai salah satu cara melanggengkan kekuasaan seiring mekanisme hasrat sebagai mesin penggerakannya. Hasrat yang membentuk, menata, dibentuk berdasarkan kemauan dan keinginan sang pembangun citra. Demikian halnya dengan pencitraan yang dibangun sebuah Partai Politik dengan berdasarkan pada mesin politik yang dimiliki, hasrat kekuasaan merupakan agenda penting yang harus terwujud.

Politik citra berbanding lurus dengan fenomena sebagian masyarakat yang pragmatis dengan melihat segala sesuatu tidak pada tataran substansi tetapi pada tampilan yang disuguhkan partai politik melalui simbolisme-simbolisme. Politik pencitraan telah menembus ruang-ruang yang telah diciptakan dengan kondisi awal sebagai ruang netral bagi aktifitas sosial masyarakat dan terbebas dari aspek politik, dan simbol memiliki peran yang besar. Ruang-ruang yang bebas dari pretensi dan kepentingan-kepentingan individu maupun sekelompok orang selain kepentingan pemenuhan kepentingan lahiriah dan batiniah sebagai makhluk sosial.

B. Pembahasan

1. Konsepsi Simbol

Simbol berasal dari kata *symbollo* yang berasal dari bahasa Yunani. *Symbollo* artinya “melempar bersama-sama”, melempar atau meletakkan bersama-sama dalam satu ide atau konsep objek yang kelihatan, sehingga objek tersebut mewakili gagasan. Simbol dapat menghantarkan seseorang ke dalam gagasan atau konsep masa depan maupun masa lalu.⁴ Simbol dapat berupa gambar, bentuk, atau benda yang mewakili suatu gagasan, benda, ataupun jumlah sesuatu, dimana makna atas simbol diperoleh dari kesepakatan bersama dalam memaknai sesuatu.

Simbol berbeda dengan tanda dan ikon. Simbol merupakan sarana dalam mempresentasikan suatu obyek, makna yang dihadirkan merupakan hasil kesepakatan terhadap obyek tersebut. Konsepsi simbolisme pada dasarnya merujuk pada penggunaan simbol-simbol sebagai sarana penyampaian pesan, aspirasi, serta hasrat. Dunia simbol tidak terlepas dari era dimana penyaluran hasrat manusia tidak dituangkan secara gamblang, tetapi pesan ditampilkan dalam perwujudan yang berbeda atau tidak nyata untuk memberikan makna tertentu terhadap suatu obyek

⁴ B, Fritz, Dorothy. *The Use of Symbolism in Christian Education*. United States of America: McmlXI W. L. Jenkins, 1952. Lihat juga Wikipedia Bahasa Indonesia

atau pesan itu sendiri. Dengan kata lain, terjadi penghalusan cara untuk mencapai tujuan tertentu yang dilekatkan pada simbol yang digunakan.

Dalam perspektif antropologi simbolik⁵, simbol politik dimaknai sebagai konfigurasi ideologi perjuangan, makna kekuasaan, dan identitas kolektif. Sebagai konfigurasi ideologi perjuangan, simbol politik mengarahkan individu untuk mengikuti sikap dan perilaku politik sesuai dengan yang diarahkan. Simbol politik sebagai eksplorasi dari makna kekuasaan yang memotivasi konflik dan kualisi. Simbol politik sebagai identitas kolektif yang berfungsi sebagai faktor integrasi di satu sisi dan sebagai citra ekspresif di sisi yang lain untuk kepentingan ke luar.

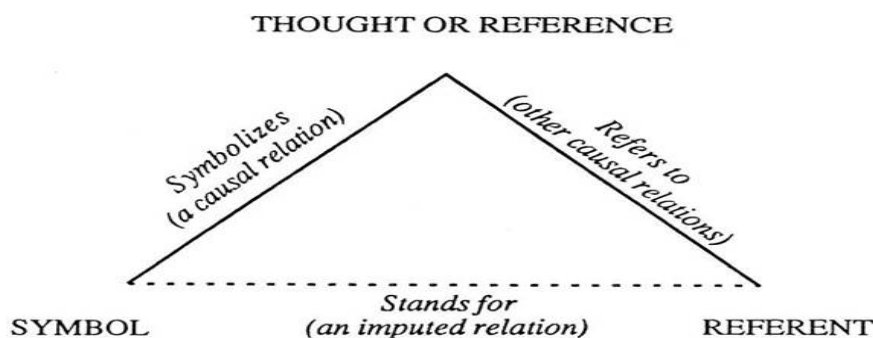
Symbolisme politik atau penggunaan simbol-simbol yang bernuansa politik menjadi fenomena yang tidak dapat dielakkan dalam proses politik. Dalam proses relasi sosial, obyek simbol memiliki makna tersendiri yang dihadirkan pada setiap individu. Makna (yang dikonsepsikan) yang dihadirkan dari simbol tersebut cenderung dapat menggiring individu atau kelompok untuk melakukan serangkaian tindakan berdasarkan tujuan dari eksistensi simbol yang dihadirkan. Dalam konsepsi Jhon⁶, dikemukakan bahwa setiap simbol mengkomunikasikan suatu konsep, pola atau bentuk yang diwujudkan suatu simbol. Terlepas dari makna kolektif yang dihadirkan masing-masing individu, pada kenyataannya juga memiliki imajinasi makna pribadi yang merupakan konsepsi pribadi dari individu bersangkutan.

Politik dan simbol menjadi entitas yang tidak dapat dipisahkan dengan standar-standar dan motif-motif kepentingan politik yang beragam. Dunia simbol sebagaimana penggambaran dari pandangan postmodernism sebagai dunia dengan standar-standar penciptaan kehidupan dan kekariban (*intimacy*), serta mengarah pada pemenuhan kehidupan bersama⁷ menggiring setiap aktifitas sosial kemasyarakatan pada standar ganda. Artinya, pada satu sisi simbolisasi-simbolisasi dihadirkan untuk menciptakan harmonisasi tetapi di sisi lain konsepsi pribadi (makna individual) tidak bisa dinafikan sebagai individu yang memiliki hasrat pribadi acuan dari simbol-simbol yang ada. Jika acuan dari simbol tersebut adalah kekuasaan, maka tindakan individu akan mengarah pada konsepsi kekuasaan. Hal tersebut dapat dilihat pada bagan berikut:

⁵ Geriya, I Wayan, *balipost*.,co.id

⁶ Little Jhon, Stephen W, 2009, *Theories of Human Communication*, Belmont; wodsworth Publishing Company, h. 153-154

⁷ Piliang, 2011, *Dunia Yang Dilipat: Tamasya Melampaui Batas-Batas Kebudayaan*, Matahari: Bandung h. 191-192



Sumber: The odgen&Richard.<http://www.iva.dk/semiotiktriangel>

Bagan di atas menunjukkan bahwa relasi-relasi yang terjadi dalam sebuah proses sosial, menghasilkan penggambaran-penggambaran atau konsepsi-konsepsi yang tidak berdiri sendiri. Tetapi konsepsi-konsepsi /pikiran-pikiran terhadap simbol sangat dipengaruhi oleh acuan-acuan (*referensi*) yang hadir ketika proses relasi sosial itu berlangsung, melalui media bahasa. Sebuah tindakan akan diterima sebagai sesuatu yang *legitimate* jika makna tujuan atau sasaran obyek menunjuk pada makna kolektif terhadap obyek yang disimbolisasikan.

2. Politik Pecitraan

Politik pencitraan merupakan sesuatu yang tampak oleh indera, tetapi tidak memiliki eksistensi substansial, karena ketertutupan realitas.⁸ Sesuatu yang ditampakkan dalam bentuk citra akan mengarah pada perbedaan realitas obyek yang sesungguhnya, perbedaan ini boleh ke arah yang lebih baik atau sebaliknya. Simbol dan “pencitraan” dalam politik tampil dengan beragam visual atau tampilan, dimana media massa memberikan kontribusi yang sangat besar. Politik pencitraan telah menembus ruang-ruang yang telah diciptakan dengan kondisi awal sebagai ruang netral bagi aktifitas sosial masyarakat dan terbebas dari aspek politik. Ruang-ruang yang bebas dari pretensi dan kepentingan-kepentingan individu maupun sekelompok orang selain kepentingan pemenuhan kepentingan lahiriah dan batiniah sebagai makhluk sosial.

Pencitraan politik juga dapat dicermati dari realitas demokrasi sebagai pilar dari sistem politik yang banyak dianut negara-negara di dunia termasuk di Indonesia. Piliang⁹ memandang demokrasi pada dua aspek yakni demokrasi sebagai realitas kehidupan sosial sehari-hari, dan demokrasi sebagaimana ia direpresentasikan sebagai citra (*image*) di dalam berbagai media informasi. Di satu pihak ada realita demokrasi, dipihak lain terdapat citra demokrasi (*image of democracy*). Ketika realita demokrasi berjalan secara mutual dengan citra demokrasi, maka akan terbentuk demokrasi sempurna. Sebaliknya ketika citra demokrasi tidak sesuai dengan realita demokrasi maka akan terbentuk demokrasi tak sempurna.

Piliang bahkan memandang lebih jauh, ketika demokrasi benar-benar telah

⁸ Pahmi, Politik Pencitraan (Gaung Persada Press, 2010), h.7

⁹ Piliang, Yasraf Amir, 2003, *Hantu-Hantu Politik dan Matinya Sosial*, Tiga Serangkai, Solo, h.253

terputus dari realitas sesungguhnya dari sebuah negara demokrasi itu sendiri yang dimaknai sebagai postdemokrasi, dimana demokrasi menampilkan dirinya pada tingkat citra sebagai ikon demokrasi. Sebuah partai politik dilukiskan lewat citraan-citraan sebagai partai yang benar-benar toleran terhadap berbagai perbedaan yang ada, padahal yang ditampilkan jauh dari realitas sesungguhnya. Hal yang dikhawatirkan dengan postdemokrasi ini adalah ketika konsep-konsep demokrasi yakni kebebasan (berkumpul, berserikat, bersuara), hak azasi manusia, persamaan, pluralism, melalui prinsip-prinsip demokrasi itu sendiri, maka kebebasan akan mengarah pada kebebasan mutlak, pluralism berkembang ke arah relativisme, hak azasi manusia akan mengarah pada apapun boleh.

Keberlangsungan sistem demokrasi agar tidak terseret pada post-demokrasi dengan resiko yang dibawanya, sangat ditentukan pada kekuatan pengendalian (*government*) dan pengaturan (*management*) dalam masyarakat. Jika kedua kekuatan tersebut tidak ada maka akan terbentuk ketidakberaturan dan ketidakpastian sehingga akan dikendalikan berbagai gerak turbulensi sosial (*sosial turbulence*) dengan salah satu konsekuensinya adalah wacana politik yang berkembang tanpa arah.

3. Realitas simbol dalam instrument partai politik

Simbol sebagai komoditi politik dapat dicermati dari penggunaan simbol baik yang dilakukan partai politik pada umumnya dan partai politik Islam khususnya, dengan tujuan simbol tersebut dianggap sebagai representasi dari eksistensi partai politik tersebut,

a. Aspek simbol pada obyek visual

Pengkondisian simbol pada obyek visual meliputi simbol-simbol yang digunakan pada lambang atau tanda gambar partai yang memiliki makna subyektif baik dari makna keagamaan, budaya atau kebiasaan masyarakat. Interpretasi makna dari aspek obyek visual berupa lambang dapat dicermati dari kesatuan warna, bentuk, dan obyek gambar-gambar yang digunakan dalam lambang tersebut, serta penampilan (*performance*) dari tokoh yang dianggap memiliki kemampuan dalam menarik simpati masyarakat.

Secara umum, pengkondisian obyek visual dapat dicermati berdasarkan ideologi partai politik, yakni ideologi nasionalis dan ideologi agama (termasuk di dalamnya partai politik berbasis agama). Pengkondisian simbol obyek visual antara lain sebagai berikut;

No.	Simbol obyek visual	Tampilan	Makna Simbolik
1	Desain Garis	Bulat	<ul style="list-style-type: none"> - Simbol perputaran yang dinamis sebagai semangat dan harapan baru, keterbukaan, dan ketegasan - Tekad yang bulat dan perjuangan yang terus-menerus tanpa terputus
		Persegi Empat	<ul style="list-style-type: none"> - Garis perjuangan partai yang menempatkan orientasi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, serta lahir dan batin secara sejajar. - Kesetaraan, keteraturan, dan keserasian. - Komitmen menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam NKRI
		Perisai Persegi	<ul style="list-style-type: none"> - Melambangkan ideologi partai - Melambangkan hari kemerdekaan Indonesia, - Kesatuan wawasan partai yang tidak dapat dipisahkan
2	Warna	Hijau	<ul style="list-style-type: none"> - Kemakmuran lahir dan batin.
		Putih	<ul style="list-style-type: none"> - Kesucian, ketulusan, dan kebenaran - Keikhlasan, kebenaran, keadilan, dan semangat baru.
		Biru	<ul style="list-style-type: none"> - Kesejukan penuh kedamaian dalam kehidupan. - Sikap tegas, mantap, percaya diri, dan penuh optimisme
3	Gambar	Kabah	Pemersatu umat Islam
		Garuda	Keberanian dalam bersikap dan bertindak.
		Matahari	Sumber cahaya dan sumber kehidupan sebagai refleksi dari kemajemukan
		Padi dan Kapas	Tercukupinya kebutuhan pangan, atau makanan yang melimpah untuk seluruh lapisan masyarakat dan tercukupinya kebutuhan sandang dan papan dan kebutuhan sekunder lainnya untuk seluruh lapisan masyarakat.

Sumber: dari berbagai sumber, diolah

Pengkondisian desain visual yang terdiri dari desain garis, warna, dan gambar, sebagaimana ditampilkan di atas menunjukkan bahwa makna simbolik yang dihadirkan masing-masing obyek visual memiliki makna dengan “nilai jual/komoditi politik” yang menguntungkan partai.

b. Aspek pengkondisian desain non visual

Ideologi

Ideologi adalah seperangkat tujuan dan ide-ide yang mengarahkan pada satu tujuan, harapan, dan tindakan. Jadi, ideologi politik dapat diartikan sebagai

seperangkat tujuan dan ide yang menjelaskan bagaimana suatu rakyat bekerja, dan bagaimana cara mengatur kekuasaan.¹⁰ Merujuk pada pendapat tersebut, maka Ideologi politik adalah sebuah himpunan ide dan prinsip yang menjelaskan bagaimana seharusnya masyarakat bekerja, dan menawarkan ringkasan order masyarakat tertentu.

Konsepsi idiologi mulai dikenal melalui tulisan Karl Marx bahwa ide tidak muncul dari kesadaran tetapi struktur sosiallah yang menentukan. Dengan mengambil sejarah perjuangan revolusi industry, Marx berasumsi bahwa idiologi merupakan salah satu alat kaum borjuis untuk mengeksploitasi kelas butuh dan pekerja¹¹. Pandangan Marx tentang idiologi dengan penekanan pada kesadaran ditentang pandangan lain. Mannheim bahkan mengasumsikan bahwa idiologi bukan hanya dipandang pada kasus borjuis dan ploretar, tatapi dapat ditemukan pada kelompok sosial lain.

Beberapa ahli mendefenisikan idiologi sebagai sebuah system sebaran ide, kepercayaan (beliefs) yang membentuk system nilai dan norma serta peraturan (regulation) ideal yang diterima sebagai fakta dan kebenaran oleh kelompok tertentu. Ideologi politik berkaitan dengan pertanyaan, "siapa yang akan memimpin?, bagaimana mereka dipilih?, idiologi mengandung banyak argument untuk persuasi atau melawan ide-ide yang berlawanan. Ideologi sangat mempengaruhi banyak sekali aspek kehidupan manusia. Ideologi merasionalisasikan kepentingan kelompok sehingga kepentingan tersebut layak diperjuangkan. Ideologi politik juga didefenisikan kesatuan system yang saling terintegrasi dan memiliki konsistensi untuk memberikan landasan logis bagi penggunaan kekuasaan. Dalam pandangan sosiologi, idiologi politik dilihat sebagai visualisasi kenyataan sosial yang sekaligus membangkitkan kesadaran sosial¹².

Peran penting ideologi politik dapat dicermati pada dua hal yakni, peran dalam internal partai dan peran dalam eksternal partai. Peran internal partai sangat terkait pada arah dan tujuan partai. Dalam konsepsi ini, idiologi menjadi dasar dari pengambilan kebijakan internal dan penanaman nilai-nilai perjuangan partai. Sedangkan peran eksternal partai mengarah pada penjabaran tujuan partai yang mengarah pada penanaman ide dan gagasan partai dalam bentuk pelaksanaan program kerja partai yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Komitmen terhadap peran gender

Reformasi politik yang digulirkan dan dicanangkan pemerintah melalui undang-undang partai politik telah membuka ruang bagi perempuan untuk turut serta berkiprah dalam ranah politik. Masuknya konsepsi gender dalam program pembangunan merupakan salah satu penguatan yang dapat mendokrak partisipasi perempuan dalam berbagai aspek kehidupan. *United Nations Development Programme*

¹⁰ Lihat Wikipedia bahasa Indonesia

¹¹ Firmansyah, 2011, *Mengelola Partai Politik: Komunikasi dan Positioning*. h.94

¹² Firmansyah, 2011, *Mengelola Partai Politik: Komunikasi dan Positioning*, h. 95-98

(UNDP) merasa bahwa paradigm pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi (*growth*) yang diukur melalui GDP (*Gross Domestik Product*) memiliki kelemahan, sehingga ukuran keberhasilan pembangunan ditambahkan dengan HDI (*Human Development Index*), yakni usia harapan hidup (*life expentancy*), angka kematian bayi (*infant mortality rate*), kecukupan pangan (*security fod*). Tahun 1995, indeks kesetaraan gender (*gender equality*) menjadi salah satu indeks dari pengukuran pembangunan, dimana dalam mengukur kesetaraan gender digunakan GDI (*Gender Development Indeks*) yang meliputi kesetaraan dalam usia harapan hidup, pendidikan, jumlah pendapatan dan penghasilan, serta GEM (*Gender Empowerment Measure*) atau mengukur kesetaraan dalam partisipasi politik serta sector lain. (Lihat, Megawangi, 1999; 24). Menempatkan kesetaraan gender sebagai salah satu bagian penting dalam mengukur keberhasilan pembangunan menunjukkan bahwa, keterlibatan perempuan dalam ranah politik merupakan suatu keharusan dimana Negara dengan instrumen politiknya (termasuk partai politik) wajib menyediakan ruang untuk aktifitas politik perempuan.

Kewenangan atau kompetensi perempuan dalam politik dianggap penting dengan berbagai alasan antara lain: *pertama*, peningkatan legitimasi negara demokrasi dan kepercayaan warga negara kepada pemerintah akibat pemberian kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan. *Kedua*, perempuan merupakan talenta terbesar dimana ide dan pemikiran mereka dapat menguntungkan masyarakat dengan pelibatan jabatan laki-laki dan perempuan sekaligus. *Ketiga*, pemberian kesempatan yang terbuka luas bagi seluruh elemen masyarakat, akan memperkuat legitimasi, stabilitas, dan pemanfaatan sumber daya. *Keempat*, Laki-laki dan perempuan memiliki pengalaman yang berbeda sehingga dapat saling mengisi dan menyempurnakan peran masing-masing (lihat Thomas dan Wilcox dalam Nurwani Idris, 2010; 117).

Undang Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik memberikan arah baru bagi system politik Indonesia dengan memberikan ruang khusus bagi keterlibatan perempuan dalam politik yang termuat dalam pasal-pasal,

Pasal 2 ayat (5)

" Kepengurusan Partai Politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan".

Pasal 29

"... (1a) Rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui seleksi kaderisasi secara demokratis sesuai dengan AD dan ART dengan mempertimbangkan paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan".

Regulasi ini kemudian menjadi pedoman bagi partai politik dalam menjabarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga partai dalam kebijakan dan program kerja partai.

C. Penutup

Pembahasan berkaitan simbol dan pencitraan dalam partai politik dapat disimpulkan bahwa penggunaan simbol-simbol yang dicitrakan pada partai politik bertujuan sebagai pemikat libido politik atau hasrat politik dalam mencapai tujuan partai. Makna simbolik yang dilakukan partai politik melalui pencitraan dapat dicermati pada tampilan simbol visual dan non visual. Makna simbolik visual merupakan penggunaan atribut-atribut keagamaan, budaya, komitmen peran gender dan non visual melalui ideologi, visi, misi, dan program partai.

Daftar Pustaka

- Alfian, M, 2009, *Menjadi Pemimpin Politik; Perbincangan Kepemimpinan dan Kekuasaan*, Gramedia, Jakarta.
- Alwi, Hasan et.al, 2003, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Bandung.
- Berger, Arthur Asa, 2005, *Tanda-Tanda Dalam Kebudayaan Kontemporer: Suatu Pengantar Semiotika*, Penerbit Ombak, Yogyakarta.
- Chilote H,Ronald, 1981, *Theories of Comparative Politics The Search for a Freedom*, diterjemahkan Teori Perbandingan Politik, PT. RadjaGrafindo Persada, Jakarta.
- Duverger, Maurice ,1993, *The Study of Politics*, diterjemahkan dengan judul Sosiologi Politik, PT. Radja Grafindo Persada, Jakarta.
- Eisenring, Tommy, 2010, *Konstruksi Sosial Arsitektur Atas Konsumtifisme (Studi Interaksionisme Simbolik pada Tiga Mal Perbelanjaan di Makassar*, UNM, disertasi
- Firmansyah, 2011, *Mengelola Partai Politik: Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik di Era Demokrasi*, Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.
- Gatara, AA Said dan Moh Dzulkiah Said, 2007, *Sosiologi Politik, Konsep dan Dinamika Perkembangan Kajian*, Pustaka Setia, Bandung.
- Geriya,I Wayan,balipost.co.id
- Huntington, Samuel, 1995, *Gelombang Demokratisasi Ketiga*, Graffiti, Jakarta.
- Johnson, Paul Doyle, 1986, *Sociological Theory Classical Founders and the Contemporary Perspectives*, diterjemahkan dengan judul Pengantar Sosiologi Klasik dan Modern, Jilid I & II PT.Gramedia, Jakarta.
- Little Jhon, Stephen W, 2009, *Theories of Human Communication*, Belmont; wadsworth Publishing Company.
- Lyotard, J.F, 1984, *The Postmodern Condition A Report on Knowledge*, Manchester University Press, Manchester.
- Pahmi, 2010, *Politik Pencitraan*, Gaung Persada Press, Jakarta.

Piliang, Yasraf Amir, 2003, *Hantu-Hantu Politik dan Matinya Sosial*, Tiga Serangkai, Solo.

-----, 2004, *Postrealitas: Realitas Kebudayaan dalam Era Post Metafisika*, Jalasutra, Jakarta.

-----, 2011, *Dunia Yang Dilipat: Tamasya Melampaui Batas-Batas Kebudayaan*, Matahari: Bandung.